



Yogyakarta Luncurkan Komite Perlindungan Kaum Difabel

YOGYAKARTA — Pemerintah Kota Yogyakarta bersama sejumlah aktivis serta perwakilan masyarakat kaum difabel meluncurkan Komite Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Disabilitas. Pembentukan komite tersebut dalam rangka memperingati Hari Disabilitas Internasional di Balai Kota Yogyakarta, kemarin. Tujuannya agar Yogyakarta terwujud sebagai kota ramah kaum difabel.

"Ada empat kelompok kerja untuk menangani lebih spesifik dan serius sesuai dengan kebutuhan kaum difabel," ujar Kepala Bidang Rehabilitasi Penyandang Masalah Sosial Dinas Sosial Tenaga Kerja Kota Yogyakarta, Octo Noor

Arafat, di sela-sela sosialisasi forum itu.

Kelompok kerja itu meliputi bidang pendidikan, kesejahteraan, advokasi/hukum, dan infrastruktur. "Forum ini adalah awal dari pemerintah dan masyarakat mengawal setiap isu disabilitas hingga selesai," kata dia.

Koordinator Organisasi Wahana Keluarga Cerebral Palsy Yogyakarta, Anies Lestari, mengkritik penanganan atas kaum difabel. Pemerintah dituding masih bermasalah menangani persoalan kaum difabel, misalnya, ihwal pendataan. "Data kaum difabel berbeda antara pemerintah, BPS, dan organisasi masyarakat," katanya.

Anggota Komite Perlindungan Difabel, yang juga menjadi Direktur Yayasan Sabda, Nurul Zaadah Andreani, itu membenarkan adanya data kaum difabel di Yogyakarta yang memang berbeda-beda. Jika mengacu dari hasil pendataan BPS, jumlah kaum difabel pada 2011 ada 1.800 orang. Sedangkan versi organisasi masyarakat pendamping kaum difabel di Yogyakarta memiliki data 2.300 orang.

Yang lebih mengejutkan lagi, hasil pendataan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Yogyakarta menyebutkan data penyandang disabilitas hanya berjumlah 300

orang. "Kami menduga petugas kecamatan atau pemerintah di tingkat bawah belum mengerti atau bisa mengklasifikasikan mana kaum difabel, mana yang bukan. Jadi, hanya dilihat dari fisiknya yang cacat," kata Nurul.

Veronika, aktivis penggagas komunitas tunarungu Dunia Tak Lagi Sunyi, menuturkan orang tua anak penyandang disabilitas sering kerepotan dan hilang jejak soal pelayanan pemerintah yang bisa diakses kaum difabel. "Kami berharap Komite itu tak hanya sekadar pusat layanan kaum difabel, melainkan juga pusat pembelajaran," kata dia.

● PRIBADI WICAKSONO

| Instansi | Nilai Berita | Sifat | Tindak Lanjut |
|--|--------------|--------|-----------------|
| 1. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi | Positif | Segera | Untuk Diketahui |
| 2. Badan Perencanaan Pembangunan | | | |

Yogyakarta, 30 Mei 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005